

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

Kebijakan *Open Door Policy* Turki terhadap Pengungsi Suriah Era Recep Tayyip Erdogan

Suci Yuliana Hidayati
20140510409

Yang Disetujui



Sidiq Anandi, S.IP., M.A
Dosen Pembimbing

Kebijakan *Open Door Policy* Turki terhadap Pengungsi Suriah Era Recep Tayyip Erdogan

Suci Yuliana Hidayati

Sidiq Ahmadi., S.IP., M.A.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This study is to find out how the response of the Turkey's Government in the Recep Tayyip Erdogan era towards Syrian refugees in Turkey. More than three million Syria civilians have been fled to Turkey since the Syrian civil war emerged in 2011. Soon afterwards, the Turkey's Government under Erdogan's command implements a policy named open door policy for Syrian refugees fleeing from their homes. In addition, one thing that remains to be questioned is the interest behind its policy. The analysis below will show how Erdogan is trying to revive the Ottoman empire's legacy as Turkey's identity and shape its national interest. The constructivism theory of Alexander Wendt emphasizes on identity that shape national interest and action. In this study, Erdogan uses Neo-Ottomanism as Turkey's current identity. Neo-Ottomanism encourages Turkey to play a global role and become a leader of the Islamic world.

Key Word: Turkey, Syria, Neo-Ottomanism, Open Door Policy, Refugees

Pendahuluan

Pada tahun 2011, Timur Tengah mengalami era yang disebut *Arab Spring* (Musim Semi Arab). Era tersebut merupakan serangkaian protes yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara guna memprotes rezim yang berkuasa pada saat itu. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Mesir, Suriah, Yaman, Bahrain, Tunisia, Libya, Aljazair, dan negara-negara Arab lainnya. Tujuan dari adanya serangkaian protes tersebut merupakan penyampaian ketidakpuasan masyarakat setempat atas kediktatoran pemimpin pada masing-masing negara tersebut yang justru menghasilkan tindak kekerasan dan kebrutalan oleh aktor-aktor yang terlibat, baik dari pihak demonstran maupun militer di bawah naungan rezim berkuasa.

Penyebab dari timbulnya *Arab Spring* di negara-negara yang telah disebutkan di atas hampir seluruhnya memiliki motif yang sama, seperti rezim pemerintahan yang melakukan tindakan korupsi, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut telah membuat masyarakat merasa geram sehingga menuntut adanya perubahan rezim yang berkuasa. Mereka mendengungkan sebuah slogan politik yang berbunyi “*as-sya’b yurid isqat an-nidzam*” yang memiliki makna yakni “rakyat ingin menumbangkan rezim ini”. Slogan politik tersebut didengungkan oleh para demonstran ketika menyampaikan protes di kota-kota besar pada masing-masing negara atau menuliskannya dengan sebuah grafiti.

Suriah menjadi salah satu negara yang tersulut kobaran semangat api dari fenomena *Arab Spring*. Masyarakat sipil Suriah turut mencoba melakukan serangkaian protes terhadap pemimpin mereka yakni Presiden Bashar Al-Assad. Selama Bashar Al-Assad memimpin Suriah, terdapat tindakan pejabat pemerintahan yang korup, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, para remaja yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh oleh pasukan Bashar Al-Assad karena menuliskan sebuah grafiti anti-pemerintah semasa Musim Semi Arab. Semenjak saat itu, rezim pemerintah bertindak represif terhadap masyarakat sipil Suriah yang melakukan aksi protes. Ditambah lagi, serangan-serangan rudal dan zat kimia berbahaya kerap kali diluncurkan oleh rezim Bashar Al-Assad telah memakan banyak korban. Tak mengherankan apabila timbul semacam pro dan kontra diantara masyarakatnya selama masa kepemimpinan Bashar Al-Assad tersebut.

Keadaan tersebut telah mendorong masyarakat Suriah melarikan diri ke tempat yang dirasa lebih aman dan menjadi pengungsi. Salah satu negara yang menjadi destinasi para pengungsi Suriah adalah Turki. Para pengungsi Suriah berbondong-bondong melewati perbatasan Turki guna mencari tempat yang lebih aman untuk menjadi tempat tinggal sementara maupun selamanya.

Arab Spring

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat dan Uni Eropa berupaya memperkuat demokratisasi di negara-negara Timur Tengah yang masyhur akan kekayaan sumber daya alam minyak bumi itu (Ghafur, 2014, hal. 88) seperti Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi bahkan Suriah melalui suatu fenomena yang disebut *Arab Spring*. Demokratisasi tersebut dilakukan dengan cara menyuntikkan semangat revolusi serta menggulingkan rezim kekuasaan yang otoriter di masing-masing negara tersebut.

Arab Spring menjadi fenomena yang secara paksa membawa sistem demokrasi ke dunia Arab yang selama beberapa dekade sebelumnya menerapkan sistem autokrasi. Demokratisasi tersebut hadir dengan berbagai pertaruhan dan pengorbanan melalui revolusi-revolusi yang menjalar ke berbagai negara dunia Arab. Sistem demokrasi ala Barat dikarakteristikan dengan adanya: pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, kebebasan warga sipil, hukum, serta adanya penghargaan atas hak asasi manusia seperti kepemilikan pribadi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, serta toleransi dalam hal beragama (Yasmine, 2015, hal. 111-112). Sebaliknya, prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara Timur Tengah.

Tunisia menjadi negara pertama yang mengadakan revolusi menuntut turunnya rezim otoriter Zainal Abidin bin Ali yang kemudian disusul oleh Mesir pada 25 Januari 2011 menuntut Presiden Husni Mubarak menanggalkan kursi pemerintahan yang telah ia duduki selama tiga dekade. Presiden Husni Mubarak sempat memerintahkan bala pasukannya dengan mengirim tank-tank ke kota guna memadamkan demonstrasi. Hingga berujung pada pengunduran dirinya tanggal 11 Februari 2011. Seolah tak mau kalah, Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah melakukan demonstrasi anti-pemerintah di pusat kota dan menyebar hingga ke kota-kota yang lain (Cutler, 2012).

Konflik Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah sendiri bukanlah suatu fenomena baru dalam hubungan internasional. Konflik ini meletus pertama kali pada Maret 2011 silam yang ditandai dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa pelajar yang menulis grafiti dengan slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota (Fahham, 2014, hal. 40). Demonstrasi tersebut terilhami dari fenomena *Arab Spring* yang pertama kali terjadi di Tunisia dimana seorang lelaki berumur 26 tahun bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya di depan khalayak ramai menggunakan cat thinner dan korek api (Hassan, 2014) karena merasa kecewa dengan rezim Zainal Abidin bin Ali yang otoriter.

Masyarakat Suriah merasakan dampak gejala politik akibat semangat revolusi Bouazizi di Tunisia hingga kemudian melakukan serangkaian gerakan demonstrasi di beberapa wilayah Suriah. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk menggulingkan Pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad yang juga otoriter. Bashar Al-Assad telah memimpin Suriah dalam beberapa tahun. Tak mengherankan apabila timbul semacam pro dan kontra diantara masyarakat selama masa kepemimpinannya.

Demonstrasi yang terjadi di Suriah disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Bashar Al-Assad yang cenderung otoriter dibarengi dengan pasukan keamanan Assad yang bertindak represif kepada masyarakat. Serangkaian demonstrasi yang terjadi di Suriah ditanggapi oleh rezim Assad sebagai pembangkangan. Sehingga rezim Assad merasa perlu untuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Bashar Al-Assad menggunakan kekuasaannya dengan jalur kekerasan yang semakin brutal. Menurut salah seorang teoritikus ilmu sosial terbesar sepanjang zaman, Thomas Hobbes, mendefinisikan kekerasan sebagai keadaan alamiah manusia meliputi tindakan

kejahatan, kasar, buas, cara berpikir yang pendek, dan adanya keinginan memerangi semua yang menggangu (Lubis, 1988).

Hal itu jelas tercermin sikap rezim Assad dalam kebijakan domestiknya yang cenderung melakukan tindakan kejahatan terhadap masyarakatnya sendiri. Demonstrasi yang terjadi di jalanan-jalanan kota yang menuntut adanya perubahan dari rezim yang berkuasa, dengan cepat justru telah berubah menjadi medan pertempuran multi-nasional yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Suriah dan oposisi, melainkan menjadi semacam *proxy war* bagi negara-negara yang adidaya hingga memakan banyak korban.

Pembahasan

Neo-Ottomanisme

Menurut Omer Taspinar dalam tulisannya yang bertajuk *Turkey's Middle East Policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism*, terdapat tiga indikator untuk mendefinisikan konsep Neo-Ottomanisme. Pertama, adanya keinginan untuk mengulang kejayaan sebagaimana pada masa Turki Utsmani dengan warisan nilai-nilai Islam di dalam maupun luar negeri. Neo-Ottomanisme bukanlah sebuah paham yang ingin merubah Turki modern seperti sekarang ini menjadi negara yang memiliki sistem hukum Islam. Sebaliknya, Neo-Ottomanisme tetap melanjutkan kebijakan Turki dengan sistem Islam yang moderat dan sekuler pada kebijakan domestik, sedangkan menerapkan kebijakan yang lebih aktif terhadap permasalahan-permasalahan luar negerinya.

Kedua, adanya rasa kepercayaan diri yang kuat dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Turki. Neo-Ottomanisme melihat bahwa Turki memiliki kekuatan secara regional untuk dapat memainkan peran yang penting dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya dengan jangkauan yang lebih luas sebagaimana kerajaan Turki Utsmani yang menjadi salah

satu pusat peradaban dunia pada zamannya. Dengan demikian, tentu hal ini kontradiktif terhadap Kemalisme (ideologi yang diusung oleh Mustafa Kemal) yang cenderung menganggap Neo-Ottomanisme membahayakan kepentingan nasional Turki khususnya dalam melebarkan sayap terhadap Timur Tengah dan Asia Tengah. Dimana diketahui bahwasannya Kemalisme lebih mencondongkan diri terhadap negara-negara Barat (Taşpınar, 2008, hal. 15).

Ketiga, Neo-Ottomanisme ingin merangkul Barat sebagaimana ia merangkul dunia Islam seperti yang terlihat saat ini. Omer Taşpınar, seorang Profesor di National War College, Amerika Serikat (Taşpınar, 2008) berpendapat bahwa konsep Neo-Ottomanisme dianalogikan seperti Dewa Janus dalam mitologi Romawi yang berwajah ganda. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai penghadapan pada sesuatu yang kontras atau menghadapi dua polaritas yang berbeda (Collins English Dictionary, 2012). Lebih jauh lagi, julukan yang diberikan kepada Turki sebagai the sick man of Europe, menjadi salah satu alasan kuat guna menyepakati bahwa Turki juga bagian dari Eropa. Neo-Ottomanisme ingin menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap Barat begitu pun dengan pengaruh politik, dan warisan-warisan Barat sebagaimana Neo-Ottomanisme ingin memosisikan Turki yang juga dekat dengan dunia Islam (Taşpınar, 2008, hal. 15-16).

Konstruktivisme Alexander Wendt

Konstruktivisme muncul menjadi salah satu teori dalam hubungan internasional setelah terjadi perdebatan antara teori-teori mainstream sebelumnya yakni antara kutub rasionalis-positivis yang terdiri dari realisme, liberalisme, dan lain sebagainya, melawan kutub reflektifis-pospositivis yang terdiri dari teori feminisme, teori kritis, teori normatif, serta teori-teori lainnya.

Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin (Reus-Smit, 2005, hal. 194) Perlu diketahui pula bahwasannya konstruktivisme memiliki beberapa tema atau kajian secara ideasional yang belum pernah dibawakan oleh teoritis-teoritis sebelumnya. Sebagaimana yang dikaji oleh Alexander Wendt mengenai identitas. Peran konstruktivisme dinilai memberikan sumbangsih dalam mewarnai paradigma hubungan internasional. Konstruktivisme dinilai mampu membawa kembali aspek-aspek sosial, sejarah, dan norma dalam hubungan internasional.

Asumsi dasar Wendt mengenai identitas adalah bahwa *“identities are the basis of interest”* (Wendt, 1992, hal. 398), yakni berkenaan mengenai identitas merupakan landasan dasar perilaku aktor dalam hubungan internasional sebelum adanya kepentingan nasional. Adapun kepentingan nasional merupakan hasil daripada identitas itu sendiri. Negara akan menjunjung tinggi kepentingan nasionalnya ketika negara tersebut telah mengetahui mengenai apa yang telah terdapat dalam dirinya dan apa saja yang harus dicapai oleh negara (Febriliansari, 2017). Hal tersebut tergambar dalam bagan berikut.

Proses Pembentukan Kebijakan dalam Pendekatan Konstruktivisme (Alexander Wendt)



Bagan tersebut menunjukkan bagaimana identitas lebih dulu membentuk kepentingan nasional suatu negara. Bagan tersebut juga menekankan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara kaum neo-realis dan neo-liberal dengan konstruktivis. Pandangan neo-realis dan neo-liberal adalah bahwasannya kepentingan nasional merupakan tenaga penggerak dalam politik internasional (Robert Jackson, 2016, hal. 372) yang melandasi agen (aktor) dalam bertindak. Tidak hanya kepentingan nasional, kaum neo-realis dan neo-liberal juga

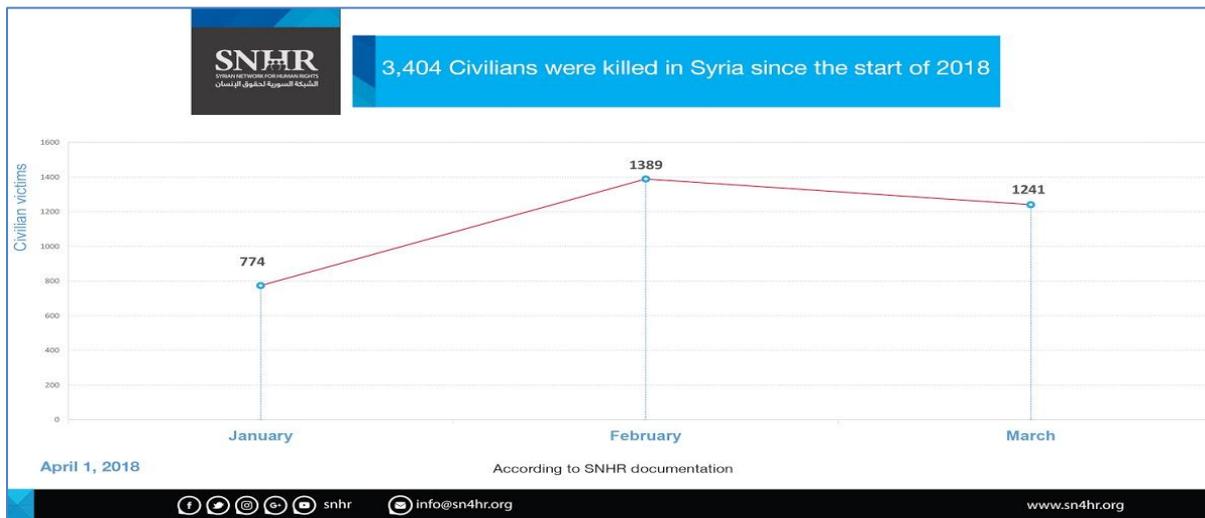
menekankan adanya kekuasaan (*power*) sebagai landasan bertindak, terutama menyangkut kemampuan ekonomi dan militer. Dalam hal ini dapat digaris bawahi bahwa neo-realis dan neo-liberal lebih memperhatikan struktur material dalam membentuk realitas sosial dan mengesampingkan ide (struktur ideasional).

Sedangkan menurut pandangan konstruktivis, struktur ideasional memegang peranan penting yang menuntun aktor dalam bertindak. Struktur ideasional tersebut dapat berupa ide, norma, nilai, agama/kepercayaan, sejarah, dan lain sebagainya. Struktur ideasional tersebut akan membentuk sebuah identitas yang digunakan oleh agen (aktor) dalam menentukan kepentingannya, kemudian melahirkan tindakan aktor dalam hubungan internasional. Dengan demikian, identitas menjadi faktor penjelas bagi aktor dalam menentukan perannya dalam urusan global.

Dampak Konflik Suriah

Menurut *Syrian Network for Human Rights* (SNHR), sebuah organisasi independen Inggris yang didirikan pada Juni 2011 silam yang memonitori selama perang sipil di Suriah. SNHR dapat melaporkan informasi terkini berkenaan dengan jumlah korban tewas setiap hari maupun setiap bulannya. Terhitung sejak awal Januari-Maret 2018, korban tewas telah mencapai 3.404 jiwa (Syrian Network for Human Rights, 2018) dengan rincian seperti yang digambarkan grafik berikut ini.

Jumlah Korban Tewas Januari-Maret 2018



Sumber: Syrian Network for Human Rights, 2018

Hingga saat ini korban terus berjatuhan, baik dari kalangan warga sipil, pasukan Pemerintah Suriah, pihak oposisi, dan aktor-aktor lain yang terlibat. Jumlah korban tewas semenjak konflik meletus pada 2011 hingga 2018 lebih dari 500.000 jiwa (I Am Syria: Total Death Count Due To Conflict, 2018).

Selain menewaskan banyak warga sipil, perang sipil tersebut turut menjadikan rumah tinggal warga Suriah dan sarana-prasarana publik sebagai objek pertempuran. Beberapa rumah sakit dan fasilitas medis pun turut menjadi serangan bom-bom Rezim Assad. Rumah sakit tersebut hancur akibat serangan udara yang dilakukan pasukan Rezim Assad dan sekutunya, Rusia (Firmansyah, 2017). Padahal rumah sakit tersebut menjadi tempat bagi para korban perang yang terluka.

Perekonomian Suriah mengalami fluktuasi. Inflasi terus membumbung tinggi, harga bahan makanan naik, solar dan berbagai barang impor jumlahnya terbatas dikarenakan banyak negara yang memberi sanksi terhadap Suriah.. Tidak hanya itu, Konflik yang sedang terjadi membawa dampak buruk bagi sektor pertanian Suriah dikarenakan lahan-lahan petani dirambah oleh pasukan keamanan Assad dalam melakukan misinya mengontrol dan

menindak penduduk sipil yang memberontak. Selain itu, kelangkaan pupuk, benih, dan pestisida turut menjadi masalah petani setempat (Butter, 2015, hal. 14).

Memburuknya keadaan Suriah akibat perang sipil juga membuat produksi gas alam mengalami kemerosotan. Jaringan pipa minyak dan gas bumi serta peralatan transmisi listrik mengalami kerusakan. Menurut *Central Intelligence Agency Fact Book*, produksi industri energi Suriah telah mengalami penyusutan sebesar 36% pada tahun 2012 (Tverberg, 2013). Dengan demikian, perang sipil telah berkontribusi terhadap penurunan konsumsi energi.

Problematika Pengungsi Suriah

Arus pengungsi Suriah semakin meluas hingga menuai perselisihan di antara negara-negara yang menjadi tujuan para pengungsi tersebut. Ada beberapa negara menerapkan kebijakan pintu terbuka terhadap pengungsi seperti Turki, Libanon, Jerman, dan lain sebagainya. Di antara negara-negara yang menolak adalah Hungaria, Republik Ceko, Polandia, dan Slovakia.

Salah satu negara yang menerima pengungsi Suriah di Timur Tengah adalah Libanon. Menurut data yang dirilis oleh UNHCR, sebanyak 1.001.051 warga Suriah nyatanya telah teregistrasi oleh Pemerintah Libanon (Syria Regional Refugee Response, 2017). Namun, masih terjadi kekerasan pada pengungsi Suriah disana. Pada Juli 2017, pasukan keamanan Libanon menangkap pemuda negaranya yang melakukan kekerasan terhadap pengungsi Suriah (Arab News, 2017). Kekerasan tersebut diawali dengan penghinaan terhadap negara Suriah dan masyarakatnya dan diakhiri dengan kekerasan fisik.

Kanselir Jerman Angela Merkel menetapkan kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi Suriah. Kebijakan pintu terbuka Jerman terhadap para pengungsi tersebut didorong oleh rasa solidaritas masyarakat Jerman yang cukup tinggi. Sementara, berbanding terbalik

Regulasi terhadap Pengungsi Suriah

1. Pendidikan

Sejauh ini, Pemerintah Turki berupaya untuk terus memberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi Suriah, mulai dari jenjang dasar hingga ke perguruan tinggi. Pemerintah Turki menjadi salah satu negara yang menandatangani Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. Dengan demikian, Pemerintah Turki menyadari bahwa pendidikan adalah hak setiap anak terlepas dari kewarganegaraannya. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1 Konvensi Internasional Hak-Hak Anak:

Negara-negara pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama: a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak... (International Crisis Group, 2016)

Pemerintah Turki memberi kesempatan kepada para orang tua pengungsi Suriah untuk mengirimkan anak-anak mereka ke Pusat Pendidikan Sementara (*Temporary Education Centres*) dan Sekolah-Sekolah Negeri Turki. Akan tetapi sejauh ini para orang tua lebih memilih mengirimkan anaknya ke Pusat Pendidikan Sementara yang diatur sedemikian rupa untuk kondisi darurat sebagaimana untuk pengungsi yang melarikan diri dari negeri asalnya.

2. Sosial-Ekonomi

Pada Januari 2016, Pemerintah Turki melalui Kementerian Tenaga kerja dan Keamanan Sosial Turki mengeluarkan regulasi baru yakni memberi izin kerja bagi para pengungsi Suriah. Regulasi ini dibuat sebagai upaya untuk memastikan hak-hak pengungsi terpenuhi. Regulasi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NGO Internasional, dan negara-negara pendonor.

UNHCR mengatakan bahwa regulasi ini merupakan suatu langkah yang berani dari Pemerintah Turki untuk menangani kasus pengungsi. Pada saat yang bersamaan, Menteri Turki untuk Uni Eropa mengakui bahwa regulasi tersebut dikeluarkan untuk mengurangi

tekanan-tekanan akibat yang ditimbulkan dari migrasi ilegal pengungsi ke negara-negara Eropa lain (Daryl Grisgraber, 2016).

3. Layanan Kesehatan

Pemerintah Turki tidak hanya memberikan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi para pengungsi Suriah, namun pada tahun 2014 Pemerintah Turki juga memberikan fasilitas layanan kesehatan. Regulasi tersebut berada dibawah naungan Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD).

Pengungsi Suriah yang telah terdaftar oleh Direktorat Jenderal Manajemen Migrasi Turki sebagai pengungsi berstatus perlindungan sementara dapat mengakses seluruh fasilitas kesehatan yang telah disediakan Pemerintah Turki termasuk diantaranya adalah mendapat surat rujukan ke rumah sakit lain. Akan tetapi, bagi pengungsi yang belum terdaftar oleh Direktorat Jenderal Manajemen Migrasi Turki, maka tidak dapat memperoleh manfaat dari layanan kesehatan tersebut kecuali layanan darurat dan layanan kesehatan primer seperti penyakit menular (Ahmet İçduygu, 2016).

Pergeseran Identitas Turki (Neo-Ottomanisme)

Turki secara perlahan memunculkan wajah Islam kembali, khususnya dalam perpolitikan Turki. Hal itu bermula ketika Adnan Menderes terpilih menjadi Perdana Menteri pada pemilihan multipartai pertama Turki pada 1950. Menderes menekankan pentingnya identitas Muslim bagi bangsa Turki yang selama ini tergerus sekulerisme dan juga memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan rezim sekuler dengan pemulihan hak-hak umat Islam. Menderes mulai menggeser orientasi kebijakan luar negeri Turki terhadap Timur Tengah yang selama ini diabaikan oleh rezim sekuler tersebut.

Kemudian upaya memunculkan kembali identitas islam (sufisme) Turki ditonjolkan kembali oleh mantan perdana menteri dan presiden Turki ke-delapan yakni Turgut Ozal. Ozal menekankan rumusan kebijakan yang bersifat non-politis seperti dalam hal sosial dan budaya sebagaimana yang telah dilakukan Turki Usmani. Selanjutnya, perjuangan mengembalikan identitas Islam (sufisme) juga dilakukan dan dilanjutkan oleh Bapak Politik Islam Turki, Necmettin Erbakan. Selama beberapa dekade ia berusaha memunculkan wajah Islam kembali dalam perpolitikan Turki. Beberapa langkah yang telah ia lakukan adalah dengan mendirikan berbagai partai Islam, namun partai yang ia dirikan kerap kali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan dapat mengganggu stabilitas Turki pada saat itu yang masih berada di bawah bayang-bayang sekulerisme Ataturk.

Kemudian hal tersebut berlanjut ketika AKP muncul dalam jagad perpolitikan Turki hingga mengantarkan Erdogan ke kursi kepresidenan. Berikut merupakan pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Turki, Ahmet Davutoglu pada saat mengikuti kegiatan partai di Kota Kizilcahamam yang menunjukkan bukti bahwa Turki saat ini memegang erat Neo-Ottomanisme.

We have an Ottoman legacy. They call it as the New Ottoman. Yes, we are the New Ottoman. We have to care about the countries in our region. We are even expanding to North Africa... (Ergec, 2014, hal. 142)

Neo-Ottomanisme telah membentuk kepentingan Turki sebagai negara yang aktif di kawasan maupun kancah global. Rezim Erdogan ingin memproyeksikan Turki sebagai pusat politik dunia dengan merangkul wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Turki Usmani dahulu seperti negara-negara Balkan, Kaukasus, hingga Timur Tengah. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Davutoglu yang berbunyi.

As in the sixteenth century, when the Ottoman Balkans were rising, we will once again make the Balkans, the Caucasus, and the Middle East, together with Turkey, the center of world politics in the future. That is the goal of Turkish foreign policy and we will achieve it.

(Hillel Fradkin, *Erdogan's Grand Vision: Rise and Decline*, 2013, hal. 44).

Terdapat tiga gambaran/citra yang berbeda mengenai Ottomanisme pada era Turki Usmani yang dapat mendukung analisa dan penjelasan berkenaan dengan kebijakan luar negeri Turki saat ini. Ketiga hal tersebut dapat dinamai sebagai tipologi dari Neo-Ottomanisme. Pertama, citra Turki Usmani sebagai puncak peradaban yakni sebagai pewaris kerajaan yang memiliki warisan budaya yang luas, Turki merasa perlu untuk mengolah dan melestarikan kebudayaan tersebut terhadap masyarakat Turki pada khususnya maupun masyarakat internasional pada umumnya. Sebagaimana pernyataan Presiden Erdogan yakni sebagai berikut:

Selama ribuan tahun, kita telah membawa peradaban yang unik, dimana kita telah membangun peradaban tersebut dengan budaya yang beraneka ragam. Termasuk didalamnya adalah bahasa. Bahasa Turki bukan hanya bahasa komunikatif milik golongan tertentu saja, melainkan bahasa Turki juga merupakan bahasa pengetahuan dan sekaligus menjadi bahasa seni dan sastra... (Agnes Czajka, 2015, hal. 2).

Pernyataan yang serupa juga pernah dilontarkan oleh Ahmet Davutoglu. Ia menyatakan bahwa Turki akan mengencarkan promosi kebudayaan terhadap khalayak internasional, salah satunya dengan mendirikan *Yunus Emre Foundation*, yakni sebuah yayasan yang khusus mempelajari kebudayaan Turki secara lebih mendalam. Yunus Emre Foundation tersebar di berbagai kawasan seperti Eropa, Timur Tengah, Asia, hingga ke Amerika Utara.

Hal ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi Neo-Ottomanisme. Berdasarkan pernyataan Davutoglu, yayasan tersebut mempunyai dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah mempertemukan budaya nasional Turki dengan budaya dari belahan negara lain. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan pengaruh kebudayaan nasional Turki dalam kancah internasional (Agnes Czajka, 2015, hal. 2).

Kedua, citra Turki Usmani sebagai kerajaan Islam. Dalam citra kedua ini terdapat dua pandangan berbeda dalam mengkaitkan Neo-Ottomanisme dengan Islamisme ala Turki

Usmani dahulu yakni versi lemah (*weak version*) dan versi kuat (*strong version*). Versi lemah melihat bahwa Neo-Ottomanisme sebagai Islamisme adalah menjadi penangkal dari ideologi Kemalisme yang lekat dengan sekulerisme, nasionalisme, dan westernisasinya. Pada citra kedua ini, agenda politik luar negeri Turki bergeser kepada Timur Tengah dan Afrika Utara, dimana sebelumnya terlalu mengikatkan diri ke Barat. Namun pergeseran tersebut bukan berarti berpaling dari Barat, akan tetapi lebih kepada penyeimbangan kembali sebagai tanggung jawab historis dan menyesuaikan dengan kepentingan kawasan saat ini. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Erdogan sebagai berikut:

Turki saat ini menjalin hubungan dengan Dunia Barat, namun bukan berarti Turki berpaling dari Dunia Timur. Kita tidak dapat membeda-bedakan sikap kita kepada negara-negara yang selama ribuan tahun telah hidup berdampingan dengan Turki... (Agnes Czajka, 2015, hal. 3).

Kemudian dari versi pendapat yang lebih kuat melihat Neo-Ottomanisme saat ini bukan menyeimbangkan hubungan antara Timur dan Barat melainkan berpaling dan menjaga jarak dari Barat dan nilai-nilainya, dan menuju ke Timur beserta nilai-nilainya. Menurut Soner Cagaptay, seorang ahli politik dari Turki, ia beranggapan bahwa Turki Usmani tidak begitu Islami, namun justru liberal. Sedangkan kebijakan luar negeri AKP saat ini lebih Islami.

Ketiga, citra Turki sebagai kerajaan yang liberal dan multikultural. Turki memanfaatkan dengan adanya citra tersebut untuk mempromosikan dan menunjukkan kepada dunia kebijakan politik domestik pada khususnya, sebagai contoh kebijakan politik terbuka terhadap etnis Kurdi dan Alawi.

Pengaruh Identitas Neo-Ottomanisme pada Kebijakan Luar Negeri Turki terhadap Pengungsi Suriah

Intrepretasi identitas Neo-Ottomanisme dalam kebijakan luar negeri Turki akan sangat beragam. Hal itu dikarenakan fleksibilitas Neo-Ottomanisme dalam berbagai aspek

dan memiliki korelasi dengan apa yang telah dilakukan Turki Usmani dahulu. Sehingga prioritas kebijakan luar negeri Turki dari era Adnan Menderes, Turgut Ozal, Erbakan hingga Erdogan berbeda-beda.

Pada era Erdogan, kebijakan luar negeri Turki lebih ditekankan kepada peningkatan posisi Turki sebagai pemimpin Dunia Islam dengan cara yang halus (Agnes Czajka, 2015, hal. 6). Saat ini Erdogan menggunakan identitas Turki Neo-Ottomanisme untuk menunjukkan perannya dalam kancah global yang disesuaikan dengan dimensi internasional saat ini, dimana konstelasi politik khususnya di Timur Tengah sedang memburuk.

Dalam hal ini, rezim Erdogan juga mengambil peran untuk membantu dan menjadi pelindung pengungsi Suriah yang melarikan diri dari kecaman konflik Suriah. Dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan keberagaman, Turki menerima kedatangan pengungsi Suriah dengan membuka pintu di perbatasan secara lebar. Semenjak konflik Suriah meletus pada 2011 hingga saat ini, rezim Erdogan berkomitmen untuk terus terbuka terhadap pengungsi Suriah yang datang ke Turki.

Kesimpulan

Suriah tersulut kobaran semangat Arab Spring pada Maret 2011, dimana kala itu bermunculan serangkaian protes di beberapa kota di Suriah. Masyarakat Suriah menginginkan sebuah revolusi dan menggulingkan Bashar Al-Assad. Namun, respon Assad begitu represif. Assad berulang kali mengirimkan pasukan militernya ke titik-titik unjuk rasa. Bahkan, Assad memilih untuk menggunakan cara-cara yang lebih berbahaya. Seperti serangan zat kimia mematikan, hingga penggunaan bom dan rudal.

Hal tersebut telah mendorong banyak di antara masyarakatnya melarikan diri dari Suriah menuju Turki yang notabene salah satu negara terdekat dengan Suriah. Dengan

kondisi tersebut, Turki mengimplementasikan sebuah kebijakan yang diberi nama *open door policy* sebagai bentuk keterbukaan Turki terhadap pengungsi Suriah yang datang kesana. Adapun regulasi-regulasi yang lahir dari kebijakan *open door policy* Turki terdiri dari beberapa hal seperti pendidikan, ekonomi dan perizinan kerja, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Pada dasarnya, *open door policy* didorong oleh identitas Turki saat ini yakni Neo-Ottomanisme dan kepentingan Turki menjadi pemimpin dunia Islam. Apabila merujuk pada pernyataan Alexander Wendt sebelumnya bahwa identitas suatu negara dapat dipengaruhi oleh elit yang berkuasa, maka dalam hal ini AKP memiliki pengaruh yang cukup dominan dalam memunculkan kembali identitas Islam di Turki. Turki menjadikan identitas Neo-Ottomanisme sebagai tonggak kepentingan yang kemudian membentuk kebijakan luar negerinya saat ini.

Neo-Ottomanisme (Ottomanisme Baru) adalah sebuah konsep lama yang baru muncul kembali ketika akhir abad 20-an. Neo-Ottomanisme berpegang teguh dengan nilai-nilai sufisme Islam sebagaimana pada era Turki Usmani dahulu. Nilai-nilai sufisme yang cinta akan perdamaian dan menjunjung tinggi keberagaman saat ini mulai dimunculkan kembali oleh rezim Erdogan.

Referensi

Buku, Jurnal, dan Website

Agnes Czajka, E. W. (2015). *GSCIS Singapore*. Dipetik March 14, 2018, dari Isanet.org: <http://web.isanet.org/Web/Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/a1b05e35-80f6-40ae-9c56-b5708c5c321e.pdf>

- Ahmet İcduygu, D. S. (2016, December 20). *Turkish Policy Quarterly*. Dipetik January 18, 2018, dari www.turkishpolicy.com: http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/syrian-refugees-in-turkey-towards-integration-policies_en_2781.pdf
- Arab News*. (2017, July 20). Dipetik December 14, 2017, dari Arab News: <http://www.arabnews.com/node/1132026/middle-east>
- Butter, D. (2015). Syria's Economy: Picking up the Pieces. *Middle East and North Africa Programme*.
- Collins English Dictionary*. (2012). Dipetik November 27, 2017, dari Dictionary.com: <http://www.dictionary.com/browse/janus-faced>
- Cutler, D. (2012, January 14). *Arab Spring: A Year that Shooked the Arab World*. Dipetik November 29, 2017, dari reuters.com: <https://in.reuters.com/article/tunisia-revolution-anniversary/timeline-arab-spring-a-year-that-shook-the-arab-world-idINDEE80C0IT20120113>
- Daryl Grisgraber, A. H. (2016). *Planting The Seeds of Success: Turkey's New Refugee Work Permits*. Washington, D.C: Refugees International.
- Fahham, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *Jurnal DPR RI*.
- Febriiliansari, N. A. (2017, May 10). *Perspektif Alternatif: Konstruktivisme dalam Ilmu Hubungan Internasional*. Dipetik April 10, 2018, dari <http://nimasayuf-fisip16.web.unair.ac.id>: [http://nimasayuf-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-174526-SOH%20201%20\(Review\)-Perspektif%20Alternatif:%20Konstruktivisme%20dalam%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional.html](http://nimasayuf-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-174526-SOH%20201%20(Review)-Perspektif%20Alternatif:%20Konstruktivisme%20dalam%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional.html)
- Firmansyah, T. (2017, May 1). *Serangan Pasukan Assad Rusak Tujuh Rumah Sakit Suriah*. Dipetik December 13, 2017, dari republika.co.id: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/05/01/op9h1g377-serangan-pasukan-assad-rusak-tujuh-rumah-sakit-suriah>
- Ghafur, M. F. (2014). Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Hassan, A. (2014, December 17). *A Fruit Vendor Whose Death Led to a Revolution*. Dipetik November 27, 2017, dari nytimes.com: <https://www.nytimes.com/2014/12/16/us/arab-spring-a-fruit-vendor-who-started-a-revolution.html>
- Hillel Fradkin, L. L. (2013). Erdogan's Grand Vision: Rise and Decline. *World Affairs Journal*, 44.
- I Am Syria: Total Death Count Due To Conflict*. (2018). Dipetik April 6, 2018, dari iamsyria.org: <http://www.iamsyria.org/death-tolls.html>

- International Crisis Group*. (2016, November 30). Dipetik January 9, 2018, dari Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/turkey-s-refugee-crisis-politics-permanence>
- Lubis, M. (1988). *Menggapai Dunia Damai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pars Today*. (2017, July 12). Dipetik December 13, 2017, dari parstoday.com: http://parstoday.com/id/news/middle_east-i40946-kerugian_ekonomi_suriah_selama_enam_tahun_perang
- Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs*. (2012, August 30). Dipetik January 5, 2018, dari http://www.mfa.gov.tr/speech-delivered-by-mr_-ahmet-davuto%C4%9Flu_-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey-at-the-un-security-council_30-august-2012_-new-york.en.mfa
- Reus-Smit, C. (2005). *Theories of Internastional Relations: Third Edition*. New York: Plagrave Macmillan.
- Robert Jackson, G. S. (2016). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosiny, S. (2012). The Arab Spring: Triggers, Dynamics and Prospects. *German Institute of Global and Area Studies*.
- Syrian Network for Human Rights*. (2018, April 1). Dipetik April 6, 2018, dari sn4hr.org: <http://sn4hr.org/blog/2018/04/01/51778/>
- Syria Regional Refugee Response*. (2017, June 30). Dipetik December 13, 2017, dari Syria Regional Refugee Response: <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122>
- Taşpınar, Ö. (2008). Turkey's Middle East Policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism. *Carnegie Papers*.
- Tverberg, G. (2013, September 9). *Oil and Gas Limits Underlie Syria's Conflict*. Dipetik November 29, 2017, dari [ourfiniteworld.com: https://ourfiniteworld.com/2013/09/09/oil-and-gas-limits-underly-syrias-conflict/](https://ourfiniteworld.com/2013/09/09/oil-and-gas-limits-underly-syrias-conflict/)
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*.
- Yasmine, S. E. (2015). Arab Spring: Islam dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah. *Journal of Universitas Airlangga*.